

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rekrutmen politik adalah dimaksudkan untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang dan posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung. Tidak semua jabatan melibatkan peranan partai politik, hanya jabatan yang bersifat politik saja (jabatan publik yang melibatkan partai politik) atau yang melibatkan peran partai politik melalui prosedur politik. (Surbakti, 2003).

Khususnya dalam konteks politik, rekrutmen politik sering mengacu pada pemilihan (pengangkatan) calon, legislasi, dan rekrutmen administratif. Pemilihan calon merupakan langkah kunci dan menentukan, karena proses rekrutmenlah yang menciptakan orang-orang yang akan menjadi wakil. Melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu), para calon memiliki kesempatan untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Menurut Norris dan Lovenduski, pola rekrutmen dipengaruhi oleh hubungan antara ketersediaan calon yang tertarik dalam karir politik dan proses seleksi yang ditentukan oleh partai politik. Terdapat dua pola rekrutmen dalam partai politik, yaitu pola vertikal dan pola horizontal.

Pola vertikal mengacu pada rekrutmen yang dilakukan secara hierarkis melalui jalur struktural di dalam organisasi partai. Dalam pola ini, kekuasaan berada di tangan organisasi partai untuk menentukan calon yang paling sesuai untuk mengisi jabatan politik. Pola ini sering disebut sebagai sistem berdasarkan prestasi (merit system). Sistem berdasarkan prestasi melibatkan proses rekrutmen yang mengutamakan keahlian, kemampuan, dan prestasi individu. Pemilihan dan kenaikan posisi politik didasarkan pada kinerja dan pencapaian yang telah dicapai oleh anggota partai.

Pola rekrutmen calon anggota legislatif merupakan proses pemilihan dan penempatan calon anggota legislatif dalam daftar calon anggota legislatif. Pola rekrutmen calon anggota legislatif yang adil dan transparan sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik pada partai politik dan proses demokrasi.

Penelitian mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Golkar di Jawa Barat dapat memberikan informasi tentang bagaimana Partai Golkar merekrut calon anggota legislatif dan apakah pola rekrutmen tersebut dapat dianggap adil, transparan, dan mencerminkan keberagaman masyarakat yang ada di Jawa Barat. Dalam penelitian ini akan membahas pola rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Golkar di Jawa Barat.

Peran penting partai politik sebagai representasi aspirasi politik masyarakat memiliki dampak signifikan dalam menentukan calon anggota legislatif. Selain itu, partai politik juga memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, proses rekrutmen calon anggota legislatif menjadi aspek yang krusial bagi partai politik. Salah satu contohnya adalah Partai Golkar, yang memiliki sejarah panjang dan peran yang penting dalam dunia politik Indonesia.

Rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Golkar telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan evolusi partai tersebut. Pada awal berdirinya, Partai Golkar belum mendapatkan status sebagai "Partai" dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan transformasi menjadi Partai Golkar. Partai Golkar Jawa Barat juga menjalin kolaborasi dengan organisasi sayap partai dalam mencari calon anggota legislatif yang memiliki potensi. Sayap dianggap memiliki jaringan yang luas dan mampu mencari calon anggota legislatif yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Partai Golkar. Kolaborasi ini dilakukan untuk memperluas cakupan rekrutmen dan memastikan bahwa calon anggota legislatif yang terpilih dapat mewakili kepentingan pemuda.

Dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif, Partai Golkar Jawa Barat juga melakukan komunikasi intensif dengan Hasta Karya baik Hasta Karya Mahasiswa, Hasta Karya Pemuda maupun Hasta Karya kelompok masyarakat dan profesi. Komunikasi intensif ini dilakukan untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang proses rekrutmen dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan anggota legislatif yang berkualitas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pola rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Golkar di wilayah Jawa Barat antara lain adalah kebijakan dan arahan dari pimpinan partai, kondisi politik dan sosial di wilayah Jawa Barat, serta tantangan dalam mencari calon anggota legislatif yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu, pola rekrutmen yang diterapkan harus selalu diperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi yang ada (Hidayatullah, 2019)

Pemilihan Calon Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jawa Barat adalah proses pemilihan anggota DPRD Jawa Barat yang terpilih dari 10 partai pada tahun 2019. Pemilihan anggota DPRD diadakan setiap lima tahun sekali, bersamaan dengan pemilihan anggota parlemen nasional. Partai Golkar adalah salah satu partai politik terbesar di Indonesia, dan telah lama terlibat dalam politik nasional dan daerah. Partai Golkar sendiri adalah partai yang memasuki posisi 4 besar di DPRD Jawa Barat dengan jumlah caleg terpilih paling banyak setelah partai Gerindra (25 kursi), PKS (21 kursi) dan PDIP (25 kursi) dengan total 16 anggota legislatif yang terpilih pada pemilihan legislatif tahun 2019 dari yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat pada hari Selasa 13 Agustus 2019. Hasil ini merupakan ketetapan dari Mahkamah Konstitusi yang memutuskan 10 Partai yang dapat turut andil dalam Pileg Jawa Barat. (Gemayasa Kurnia Putra, 2022).

Hal ini membuktikan bahwa partai Golkar belum ideal di Jawa Barat jika dibandingkan di tingkat nasional menempati urutan ke 2, dengan memperoleh suara sebanyak 13,3 persen (16 orang) dari 120 anggota legislatif terpilih di DPRD. Sehingga belum menjadi partai yang dominan. Permasalahannya adalah bagaimana cara partai Golkar untuk melakukan rekrutmen politik agar partai Golkar naik posisi

menjadi partai dominan menyumbang kursi legislatif di DPRD Jawa Barat (ui, 2020)

Agar analisis penulis fokus pada inti permasalahan, maka penulis membuat rumusan masalah terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai “**Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Partai Golkar (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat)**”. Analisis ini dilakukan karena ada tujuan yang ingin diperoleh. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme rekrutmen Caleg dari Partai Golkar untuk daerah Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Supaya lebih jelas serta terarahnya permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu fokus permasalahan tersebut akan dirumuskan dengan :

1. Bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif pada Partai Golkar di Jawa Barat pada Pemilu 2024?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pola rekrutmen calon anggota legislatif pada Partai Golkar di Jawa Barat pada Pemilu 2024 ?
3. Bagaimana dampak pola rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Golkar Jawa Barat terhadap kualitas dan representasi anggota legislatif dari Partai Golkar di DPRD Provinsi Jawa Barat 2019-2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan dan menganalisis pola rekrutmen calon anggota legislatif pada Partai Golkar di Jawa Barat pada Pemilihan Legislatif 2024.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pola rekrutmen calon anggota legislatif pada Partai Golkar di Jawa Barat 2024.
3. Menganalisis dampak pola rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Golkar Jawa Barat pada pemilihan legislatif terhadap kualitas dan representasi anggota legislatif yang terpilih di DPRD provinsi Jawa Barat 2019- 2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

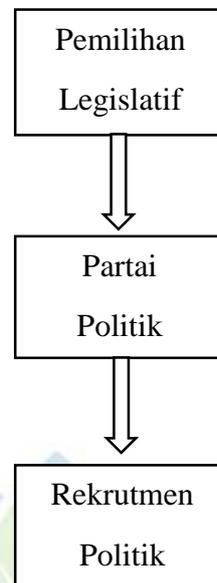
1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah menambah pengetahuan di bidang rekrutmen politik serta memberikan manfaat bagi penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan bidang kajian rekrutmen politik di masa depan. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang peran Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif di Provinsi Jawa Barat, yang dapat dijadikan sebagai referensi pertimbangan bagi pengambilan kebijakan oleh partai lain dalam mengelola proses rekrutmen calon anggota legislatif

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bagi penulis mampu menambah keterampilan meneliti sehingga meningkatkan kualitas penulis dalam berpikir ilmiah. Lalu bagi Partai politik di Indonesia khususnya partai golongan karya Provinsi Jawa Barat adalah dalam rangka memberikan masukan bagi Partai Golkar dalam meningkatkan efektivitas proses rekrutmen calon anggota legislatif di Provinsi Jawa Barat.

E. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Teori rekrutmen politik membahas bagaimana individu dipilih dan diangkat ke dalam posisi politik tertentu, baik sebagai calon maupun sebagai pemimpin. Dalam praktiknya, rekrutmen politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui pemilihan umum, pemilihan langsung, penunjukan, atau melalui pengangkatan oleh kelompok elit atau partai politik. Setiap cara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada konteks politik dan budaya yang ada. Ada beberapa teori yang dapat dijadikan dasar dalam memahami rekrutmen politik, di antaranya adalah:

1. Teori Patronase – Edward Aspinall

Dalam konsep yang dikemukakan oleh Edward Aspinall pada tahun 1913, patronase didefinisikan sebagai suatu mekanisme distribusi sumber daya material dengan tujuan tertentu yang juga memberikan manfaat politik. Lebih spesifik lagi, sumber daya material ini didistribusikan melalui jaringan klientelistik yang berbasis pada relasi kekuasaan personal.

Patronase merupakan fenomena yang umum terjadi dalam politik dan masyarakat di berbagai negara. Dalam praktiknya, patronase sering terjadi ketika pemimpin politik atau elit berkuasa menggunakan kekuasaan dan otoritas mereka untuk mendistribusikan sumber daya material seperti pekerjaan, kontrak, dana, atau bantuan lainnya kepada kelompok atau individu tertentu. Tujuan dari patronase ini umumnya untuk memperkuat basis politik mereka, membangun jaringan loyalitas, atau memperoleh dukungan politik.

2. Teori Sistem Rekrutmen Politik - Michael Rush dan Philip Althof

Sistem rekrutmen politik yang umum digunakan dalam suatu sistem politik adalah seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan. Teori ini diungkapkan oleh Michael Rush dan Philip Althof pada tahun 2000. Dalam sistem rekrutmen ini, calon pelamar harus melewati serangkaian ujian dan seleksi untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Prosesnya biasanya melibatkan tes tertulis, tes psikologi, wawancara, dan penilaian keterampilan praktis terkait dengan jabatan yang akan diisi. Tujuan dari ujian ini adalah untuk menilai kemampuan dan kualifikasi calon pelamar dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan tersebut.

Secara keseluruhan, sistem rekrutmen politik melalui seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam mengisi jabatan di sektor birokrasi dan administrasi pemerintahan. Meskipun memiliki kelebihan dan kelemahan, penting untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem rekrutmen ini agar dapat menghasilkan pegawai publik yang berkualitas dan mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik.

Dalam penelitian ini penting juga untuk melakukan studi pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen calon anggota legislatif di daerah tersebut berlangsung. Studi di Golkar Jawa Barat ini dapat menyediakan informasi yang lebih terperinci mengenai bagaimana teori-teori yang dipilih dapat diterapkan dalam konteks spesifik tersebut.